

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan wujud dari usaha untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bidang ekonomi pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa usaha yang sesuai dengan pasal tersebut adalah koperasi.

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Sesuai dengan pengertian koperasi bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (2014) saat ini perkoperasian di Indonesia berjumlah 209.488 dan koperasi yang aktif sebanyak 147.249 dan koperasi yang tidak aktif sebanyak 62.239. Saat ini koperasi di Indonesia masih berkembang menuju ke tahap yang lebih baik. Indonesia memiliki banyak jenis koperasi. Salah satu jenis koperasi yang saat ini berkembang dan banyak diminati di Indonesia yaitu koperasi simpan pinjam dan aneka usaha. Koperasi simpan pinjam dan aneka usaha ini banyak diminati karena menawarkan jasa kemudahan dalam pinjaman dan tanpa agunan. Salah satu koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam dan aneka usaha ialah KPRI Lindung BAPERLINTAN SUMSEL. Dalam kegiatan simpan pinjam dan aneka usaha KPRI Lindung membutuhkan laporan keuangan yang bertujuan untuk menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan suatu entitas yang

bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan sebagai sumber informasi harus dapat dimengerti oleh karena itu dalam menyusun laporan keuangan, koperasi dihadapkan pada kemungkinan bahaya penyimpangan, dan ketidaktepatan. Untuk meminimalkan bahaya ini, profesi akuntansi mengesahkan seperangkat standar dan prosedur umum yang disebut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum (*generally accepted accounting principle*). Di Indonesia prinsip akuntansi ini disusun dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Saat ini, Indonesia memiliki empat standar akuntansi keuangan yaitu PSAK berbasis IFRS, PSAK Syariah, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan SAK ETAP.

Pada mulanya koperasi menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 27 tentang Akuntansi Koperasi. Namun pada tanggal 23 Oktober 2010, Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) Nomor 8 tentang Pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 27 Tentang Akuntansi Koperasi. Hal ini berdampak pada perubahan penyajian laporan keuangan koperasi yang semula mengacu pada PSAK 27. Pada periode berikutnya yaitu tepatnya tanggal 1 Januari 2011, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) telah dinyatakan efektif berlaku untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Entitas yang dapat menggunakan SAK ETAP adalah yang memenuhi dua kriteria, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) bagi pengguna eksternal. Pada umumnya, entitas tanpa akuntabilitas publik adalah perusahaan mikro, kecil dan menengah (UMKM) termasuk koperasi. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, pasal 37 ayat 2 menyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan koperasi harus mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang baru Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi, supaya seluruh koperasi menggunakan dan mematuhi aturan yang baru yaitu SAK ETAP.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penulisan Laporan Akhir ini penulis mengambil judul “ **Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atas Penyajian Laporan Keuangan pada KPRI Lindung BAPERLINTAN SUMSEL** “.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan yang timbul pada KPRI Lindung BAPERLINTAN SUMSEL adalah :

1. Apakah penyajian laporan neraca KPRI Lindung sesuai dengan SAK ETAP?
2. Apakah penyajian laporan SHU KPRI Lindung sesuai dengan SAK ETAP?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap pembahasan, serta agar analisis menjadi terarah dan sesuai dengan masalah yang ada, maka penulis membatasi pembahasan Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Tahun 2009 atas Penyajian Laporan Keuangan pada KPRI Lindung BAPERLINTAN SUMSEL selama tiga tahun yaitu tahun 2011, 2012, dan 2013 yang meliputi posisi keuangan dan kinerja keuangan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan penulisan Laporan Akhir ini untuk menganalisis penerapan SAK ETAP atas penyajian laporan keuangan pada KPRI Lindung BAPERLINTAN SUMSEL dan untuk menerapkan penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP Tahun 2009 pada KPRI Lindung terutama :

1. Untuk menyajikan laporan neraca sesuai dengan SAK ETAP pada KPRI Lindung.
2. Untuk menyajikan laporan SHU sesuai dengan SAK ETAP pada KPRI Lindung

1.4.2 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan Laporan Akhir ini adalah :

1. Sebagai sarana bagi penulis untuk menganalisis, dengan penerapan pada perusahaan yang berkaitan terhadap penerapan SAK ETAP tahun 2009 atas Penyajian Laporan Keuangan, sehingga dapat mengetahui seberapa jauh pemahaman dan penjabaran yang dapat dilakukan dalam teori-teori tersebut.
2. Sebagai bahan masukan untuk KPRI Lindung BAPERLINTAN SUMSEL, dalam penerapan standar akuntansi keuangan koperasi yaitu SAK ETAP (2009) atas penyajian laporan keuangan.
3. Sebagai referensi dalam penyusunan Laporan Akhir dimasa yang akan datang bagi mahasiswa tahun berikutnya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Data adalah sesuatu yang telah terjadi dan dapat dijadikan fakta atau bukti untuk mendukung analisis terhadap permasalahan yang dibahas. Dalam menyusun laporan akhir ini dibutuhkan data yang andal, akurat, dan objektif serta mendukung sebagai bahan analisis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan.

Menurut Sugiyono (2009:194) teknik pengumpulan data ada tiga yaitu :

1. *Interview* (Wawancara)

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun penggunaan telepon.

 - a. Wawancara terstruktur

Pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya.
 - b. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara yang bebas dimana penelitian menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.
2. *Quesioner* (Angket)

Teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

3. *Observation* (Observasi)

Teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Teknik pengumpulan data juga dapat dilakukan dengan riset kepustakaan (*library research*), yaitu riset pengumpulan data dengan cara membaca semua literatur yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi untuk mengumpulkan data informasi yang dibutuhkan

Berdasarkan teknik pengumpulan data diatas maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pembuatan laporan akhir ini meliputi :

1. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan tentang garis-garis besar permasalahan kepada pihak koperasi.
2. Observasi nonpartisipasi, yaitu penelitian tanpa terlibat langsung dalam kegiatan koperasi tersebut, penulis hanya mengamati.
3. Study kepustakaan, yaitu mengumpulkan informasi-informasi dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar Laporan Akhir ini terdiri dari 5 bab yang isinya mencerminkan susunan atau materi yang akan dibahas. Dimana setiap bab memiliki hubungan. Untuk memberikan gambaran yang jelas berikut ini akan diuraikan mengenai sistematika pembahasan laporan akhir ini secara singkat yaitu:

Bab I **Pendahuluan**

Pada bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab II **Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan teori-teori yang digunakan dalam melakukan analisa dan pembahasan masalah. Adapun teori-

teori tersebut antara lain pengertian koperasi, SAK ETAP atas Penyajian Laporan Keuangan, undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian .

Bab III Gambaran Umum Perusahaan

Pada bab ini akan diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan KPRI Lindung BAPERLINTAN SUMSEL, antara lain mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi koperasi dan uraian tugas, kegiatan usaha koperasi, simpanan anggota koperasi, laporan keuangan yang disajikan oleh KPRI Lindung BAPERLINTAN SUMSEL.

Bab IV Pembahasan

Bab ini berisi pembahasan tentang penerapan SAK ETAP tahun 2009 atas penyajian laporan keuangan pada KPRI Lindung BAPERLINTAN SUMSEL selama tiga tahun terakhir yaitu 2011, 2012, dan 2013.

Bab V Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan penulis maka akan di buat simpulan yang merupakan inti dari hasil analisis dan dapat memberikan saran sebagai masukan yang bermanfaat bagi koperasi dimasa yang akan datang.